Policy Brief

PENYEBARLUASAN *BEST PRACTICE* MADRASAH IBTIDAIYAH

Aji Sofanudin dan Nugroho Eko Atmanto

Ringkasan Eksekutif

Kementerian Agama RI memiliki strategi peningkatan mutu madrasah dengan mengklasifikasi keunggulan-keunggulan madrasah meliputi: (1) MAN Insan Cendekia, (2) Madrasah Model, (3) Madrasah berbasis pesantren, (4) Madrasah berbasis riset, (5) Madrasah mandiri (*entrepreneurship*), (6) Madrasah vokasional, (7) madrasah berbasis afiliasi, (8) madrasah berbasis partnership MEDP-ADB dan AIBEP serta (9) perpustakaan madrasah inspiratif (Madrasah, 2014). Dengan klasifikasi tersebut masing-masing madrasah dapat mengembangkan mutu pendidikan sesuai dengan kondisi dan situasi madrasah. Temuan penelitian tentang *Best Practice* Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta menyebutkan bahwa (1) berdasarkan FGD dengan Kabid Dikmad Kemenag Provinsi DIY dan Kasi Kemenag kab/kota, akreditasi madrasah, animo masyarakat yang tinggi terhadap madrasah ibtidaiyah, dan penilaian peneliti disimpulkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Unggul berbasis pesantren di Yogyakarta meliputi: MI Sunan Pandanaran, MI Wahid Hasyim dan Afkaaruna Islamic School (2) keunggulan MI Sunan Pandanaran dan MI Wahid Hasyim karena nama besar pondok pesantren, pengelola yang visioner, guru relatif muda, dukungan masyarakat yang tinggi. Afkaaruna Islamic School memiliki keunggulan dalam hal kurikulum, kompetensi guru, dan dukungan sarana dan prasarana (3) madrasah ibtidaiyah unggul berbasis pesantren adalah madrasah yang melakukan berbagai inovasi pendidikan (Atmanto dan Sofanudin, 2020).

Ditujukan kepada

1. Ketua Komisi VIII DPR RI
2. Menteri Agama RI
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman

Isu Strategis

1. Minimnya pengetahuan stakeholder madrasah terkait *best practice* madrasah ibtidaiyah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama
2. Penyelenggaraan pendidikan madrasah ibtidaiyah relatif “berjalan sendiri” tidak ada intervensi pemerintah dalam bentuk substansi pengelolaan madrasah
3. Belum adanya forum koordinasi madrasah-madrasah inovatif sebagai wadah silaturahmi dan peningkatan mutu madrasah ibtidaiyah

Pengantar

Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Sutrisno, menyebutkan bahwa maksud pendirian madrasah adalah mengumpulkan keunggulan yang ada pada pesantren dan keunggulan yang ada pada sekolah sekaligus pada satu lembaga. Pesantren memiliki keunggulan dalam ilmu agama Islam dan sekolah memiliki keunggulan dalam ilmu-ilmu umum. Madrasah didirikan agar memiliki keunggulan dalam ilmu-ilmu agama Islam sebagaimana yang ada pada pesantren dan memiliki keunggulan dalam ilmu-ilmu umum sebagaimana yang ada pada sekolah. Jika kenyataan sekarang, kualitas madrasah kalah dibandingkan dengan pesantren dalam ilmu-ilmu agama Islam dan kalah dengan sekolah dalam ilmu-ilmu umum, adalah realitas yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, madrasah harus dikembalikan pada maksud awal didirikannya lembaga itu (Sofanudin, 2016).

Mafhum bahwa karakteristik madrasah beragam. Ada madrasah mandiri, madrasah kompleks (MI, MTs, dan MA), serta ada madrasah yang berbasis pesantren. Semua tipe madrasah mengemban tugas yang sama yakni memberikan teladan terbaik dalam pengelolaan pendidikan. Amanat pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memberikan teladan dan menjaga baik lembaga, profesi dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Salah satu *best practice* madrasah adalah mengembangkan madrasah yang humanis dan religius yakni madrasah yang mengembangkan nilai-nilai dasar humanis dengan tetap berada dalam kerangka religius. Bukan humanisme yang sekuler, melainkan humanisme yang sesuai dengan nilai-nilai religius (ilmu, aqidah, ibadah, akhlak, ma'rifah) (Hibana, Kuntoro, & Sutrisno, 2015). Pengelolaan madrasah perlu menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya. Salah satu yang bisa menjadi contoh adalah *best practice* pada Sekolah Alam (Sofanudin,

2019a). Pendidik dan tenaga kependidikan madrasah perlu menjadi teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesinya.

Nilai-nilai religius menjadi ciri utama lembaga pendidikan madrasah. Madrasah telah memberikan banyak praktik terbaik, baik dalam pembelajaran maupun pengelolaannya. Beberapa madrasah telah melakukan inovasi Pendidikan (Aji Sofanudin, Rokhman, Wasino, & Rusdarti, 2016). Salah satu madrasah yang telah melakukan inovasi adalah MI Wahid Hasyim Yogyakarta (Sofanudin, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan madrasah. Pengelolaan pendidikan merupakan cara baru mengelola madrasah, memiliki hasil luar biasa, berkelanjutan, dan mampu menginspirasi pihak lain untuk mengadopsi. Salah satu indikator madrasah bermutu adalah madrasah yang diminati oleh masyarakat (Sofanudin, 2012). MI Wahid Hasyim dan Sunan Pandanaran Yogyakarta merupakan contoh madrasah berbasis pesantren yang banyak diminati masyarakat. Salah satu unsurnya adalah karena siswa MI Sunan Pandanaran dan Wahid Hasyim berasal dari berbagai macam daerah. Keduanya terbawa nama besar pondok pesantren sehingga menarik minat masyarakat.

MI Wahid Hasyim melakukan beberapa inovasi di berbagai bidang: kurikulum, sumber daya manusia, dan pembelajaran. *Best practice* MI Wahid Hasyim adalah terintegrasi antara pembelajaran madrasah dengan pesantren. Bentuk integrasi madrasah dengan pesantren nampak pada implementasi kurikulum di madrasah yang merupakan gabungan antara kurikulum I (kurikulum formal/pagi) dan kurikulum II (kurikulum asrama/pesantren/diniyah). Madrasah berbasis pesantren merupakan salah satu keunggulan madrasah. Kelas dibagi menjadi tiga model: kelas biasa, kelas tahfidz, dan kelas asrama. Seiring perkembangan waktu, pengelolaan madrasah bisa saja mengalami kemunduran. Sementara MI Sunan Pandanaran memiliki keunggulan kepala madrasah yang visioner, adanya struktur divisi: humas, kurikulum, kesiswaan, keagamaan, SKL, tata usaha, perpustakaan, BP/BK, mahkamah Bahasa, dan kearsipan; SDM guru yang relatif muda, hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

Kebijakan yang Ada

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Permen PAN RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

4. SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
5. Surat Sekjend Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Corona Virus Disease (Covid-19)
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran tahun Ajaran 2020/2021
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2791 tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah
8. Surat Edaran Nomor B-699/Dt.I.I/PP.03/03/2020 tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan
9. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Implikasi Kebijakan

1. Ada adagium menyatakan bahwa tidak ada madrasah yang jelek, yang ada adalah pengelolaan madrasah yang tidak baik. Faktor pengelolaan menjadi kata kunci peningkatan mutu madrasah. Pengelolaan madrasah dalam rangka peningkatan mutu setidaknya menyangkut lima aspek: aspek manajemen, pemanfaatan komputer dan internet dalam pembelajaran, budaya kerja tim (team work), pemanfaatan alat bantu pembelajaran dan keterlibatan guru, siswa, orang tua dan stakeholder (Arif, 2013).
2. Mutu Pendidikan menurut Sallis terdiri atas mutu standar dan mutu persepsi (Sallis, 2014). Dalam konteks sekolah/madrasah mutu standar adalah mutu akreditasi lembaga. Madrasah ibtidaiyah yang bermutu adalah madrasah yang memiliki nilai akreditasi yang tinggi berdasarkan penilaian assessor BAN S/M. Mutu persepsi merupakan mutu berdasarkan penilaian konsumen. Dalam konteks madrasah, animo

masyarakat yang tinggi terhadap suatu lembaga merupakan bukti bahwa lembaga tersebut tersebut. Oleh karena itu, mutu madrasah setidaknya mengandung dua hal: akreditasi yang bagus sekaligus diminati oleh masyarakat. Untuk mendapatkan dua hal tersebut, madrasah idealnya sudah membuktikan dengan *best practice* yang dilaksanakan. Selain akreditasi, pada Sekolah Islam Terpadu di bawah JSIT mengadakan penjaminan mutu dalam bentuk lisensi (Sofanudin, 2019b).

3. *Best practice* mengandung pengertian “pengalaman terbaik” dari keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan tertentu (Kemendibud, 2016). *Best practice* kepala madrasah adalah pengalaman terbaik yang dimiliki kepala madrasah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala. Kepala madrasah harus memiliki kompetensi: (1) kepribadian; (2) manajerial; (3) kewirausahaan; (4) supervise; dan (5) sosial. Wujud *best practice* kepala madrasah dan guru madrasah tercermin dalam perolehan akreditasi dan animo masyarakat yang tinggi terhadap madrasah.

Alternatif Kebijakan

1. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong kementerian Agama agar mengadopsi kelebihan Pengelolaan Pendidikan Islam yang dikembangkan berbagai madrasah
2. Kementerian Agama RI cq Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu menyusun kurikulum Pendidikan Islam yang lebih komprehensif
3. Kanwil Kementerian Agama Propinsi DIY lebih intensif melakukan sosialisasi layanan pendidikan yang ada di Kementerian Agama

Rekomendasi Kebijakan

1. Kantor Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cq Bidang Pendidikan Madrasah perlu mengumpulkan *Best Practice* Pengelolaan Madrasah yang ada di wilayah kerjanya
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman cq Seksi Pendidikan Madrasah perlu melakukan evaluasi pengelolaan madrasah untuk memperkuat kelembagaan, misalnya dengan menginstruksikan masing-masing madrasah melakukan Analisis SWOT

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman cq Seksi Pendidikan Madrasah perlu membuat inovasi yang strategis untuk penguatan kelembagaan madrasah menyangkut pembelajaran, pembiayaan, kurikulum dan manajemen

Referensi

- Aji Sofanudin, Rokhman, F., Wasino, & Rusdarti. (2016). Quality-Oriented Management of Educational Innovation at Madrasah Ibtidaiyah. *Journal of Education and Practice*.
- Arif, M. (2013). MANAJEMEN MADRASAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.2.415-438>
- Hibana, H., Kuntoro, S. A., & Sutrisno, S. (2015). PENGEMBANGAN PENDIDIKAN HUMANIS RELIGIUS DI MADRASAH. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v3i1.5922>
- Madrasah, D. P. (2014). *Madrasah@Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Sallis, E. (2014). Total quality management in education: Third edition. In *Total Quality Management in Education: Third Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780203417010>
- Sofanudin, A. (2012). MINAT MASYARAKAT TERHADAP MODEL PENDIDIKAN MADRASAH DI MAGELANG DAN DEMAK. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v10i3.170>
- Sofanudin, A. (2016). Manajemen Inovasi Pendidikan Berorientasi Mutu Pada MI Wahid Hasyim Yogyakarta. *Cendekia: Journal of Education and Society*. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v14i2.820>
- Sofanudin, A. (2019a). BEST PRACTICE IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA SEKOLAH ALAM INSAN MULIA (SAIM) SURABAYA. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*. <https://doi.org/10.18784/smart.v5i1.744>
- Sofanudin, A. (2019b). CURRICULUM TYPOLOGY OF ISLAMIC RELIGION EDUCATION IN INTEGRATED ISLAMIC SCHOOL (SIT). *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i1.563>